

## Kawal Pembangunan Jalan Kubar-Mahulu



*Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel siap mengawal pembangunan jalan penghubung Kabupaten Kubar dan Mahulu.*

*(Sumber gambar: korankaltim.com) Senin, 02/06/2025*

**BARONG TONGKOK** - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp206 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Kubar dengan Kabupaten Mahulu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025.

Anggaran Rp206 miliar tersebut dibagi menjadi 4 (empat) segmen. Yakni untuk segmen 1 dan 2 masing-masing Rp53 miliar, kemudian untuk segmen 3 dan 4 masing-masing Rp50 miliar.

Ini menjadi perhatian besar karena untuk pertama kalinya, Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, menggelontorkan dana ratusan miliar rupiah guna mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung antar dua kabupaten tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kubar-Mahulu, menyambut baik langkah ini. Ia menilai anggaran besar dari APBD Kaltim sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan jalan yang selama ini belum maksimal.

"Sebelum kepemimpinan Pak Rudi dan Pak Seno, yang saya lihat itu anggaran untuk jalan Kubar-Mahulu ini, paling besar Rp25 miliar.

Jadi penanganan dari Tering (Kubar) sampai Simpang Long Hubung masih belum optimal. Sementara ruas jalan yang dibiayai melalui APBN seperti dari Long Hubung ke

Ujoh Bilang, progresnya jauh lebih cepat karena didukung pendanaan yang memadai," kata Ekti Imanuel, Sabtu (31/5).

Melihat konsentrasi Pemprov Kaltim terhadap infrastruktur, khususnya jalan di Mahulu, Ekti menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses pembangunan agar berjalan sesuai target dan tepat waktu, sebagaimana ditargetkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, rampung tahun 2026.

"Artinya, pesan saya seperti itu kepada masyarakat Mahulu. Percaya saja, bahwa proses pembangunan jalan ini sangat prioritas juga bagi Pemprov Kaltim, dan saya mengawal penuh," tegas Ekti.

Sebagai informasi, jalan penghubung Kubar-Mahulu sepanjang 136 kilometer saat ini belum ada status (non-status), sehingga penanganannya dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Rinciannya, dari titik nol (sta 0) di Simpang Tiga Purworejo, Tering, hingga sta kilometer 10 menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui APBN. Kemudian, dari sta kilometer 10 hingga sta kilometer 41 ditangani dengan APBD Provinsi Kaltim.

Selanjutnya, dari sta kilometer 41 hingga sta kilometer 117 kembali ditangani oleh APBN. Sementara dari sta 117 hingga titik akhir di Ujoh Bilang (sta 136) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mahulu. **(rri/han/ga)**

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Kawal Pembangunan Jalan Kubar-Mahulu, 02/06/2025.

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, diatur sebagai berikut.
  - (1) Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
  - (2) Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP 34/2006) diatur bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
  - a. jalan nasional;
  - b. jalan provinsi;
  - c. jalan kabupaten;
  - d. jalan kota; dan
  - e. jalan desa.
3. Dalam Pasal 27 huruf b PP 34/2006 diatur bahwa jalan provinsi yang dimaksud yaitu jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota.